

PARTISIPASI POLITIK/PUBLIK DAN DEMOKRASI

ADİYANA SLAMET, M.SI



PARTISIPASI POLITIK

PARTISIPASI POLITIK, MENURUT KEVIN R HARDWICK SEBAGAI PERHATIAN DARI WARGA NEGARA YANG BERUPAYA MENYAMPAIKAN KEPENTINGAN-KEPENTINGANNYA TERHADAP PEJABAT PUBLIK; SEDANG MERIAM BUDIARDJO MENGARTIKAN SEBAGAI KEGIATAN SESEORANG ATAU KELOMPOK UNTUK IKUT SERTA AKTIF DALAM MEMILIH PIMPINAN NEGARA DAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH (*PUBLIC POLICY*) (FATURROHMAN DAN SOBARI, 2002 : 185). ATAU MENURUT SAMUEL P. HUNTINGTON SEBAGAI KEGIATAN WARGA NEGARA YANG BERETINDAK SECARA PRIBADI ATAU KOLEKTIF DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEPUTUSAN OLEH PEMERINTAH, SECARA SPONTAN ATAU TERORGANISASI, MANTAP ATAU SPORADIS SECARA DAMAI ATAU KEKERASAN, LEGAL (PEMILU) ATAU ILEGAL DAN EFEKTIF ATAU TIDAK EFEKTIF. BISA BERUPA (A) AGREGASI KEPENTINGAN (*INTEREST AGGREGATION FUNCTION*), PADA FUNGSI INI TERDAPAT PROSES PENGGABUNGAN KEPENTINGAN, UNTUK KEMUDIAN DIRUMUSKAN DAN DISALURKAN KEPADA PEMEGANG KEKUASAAN ATAU PEMERINTAH YANG MEMEGANG KEKUASAAN DAN YANG BERWENANG (*AUTHORITY* ATAU *LEGALIZED POWER*) UNTUK DIJADIKAN KEBIJAKAN PUBLIK (*PUBLIC POLICY*). (B) FUNGSI ARTIKULASI KEPENTINGAN (*INTEREST ARTICULATION FUNCTION*), PADA FUNGSI INI TERJADI PROSES SINTESIS ASPIRASI INDIVIDU-INDIVIDU SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK YANG BERUPA IDE, PENDAPAT YANG KEMUDIAN DIJADIKAN POLA DAN PROGRAM POLITIK.

PARTISIPASI PUBLIK

PARTISIPASI PUBLIC LEBIH DITEKANKAN PADA PROSES PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PUBLIC

PAERISIPASI PUBLIC PADA DASARNYA MERUPAKAN BAGIAN DARI PARTISIPASI PADA UMUMNYA. MERUJUK PADA THE 1995-1997 WORLD VALUE SURVEY, CHARLES ANDRIAN DAN JAMES SMITH (2006) DALAM MARIJAN (2010:111) MENGELOMPOKAN TIGA BENTUK PARTISIPASI:

- 1. PARTISIPASI PASIF, PARTISIPASI DILIHAT DARI KETRLIBATAN POLITIK SESEORANG, YAKNI SEJAUHMANA ORANG ITU MELIHAT POLITIK SEBAGAI SESUATU YANG PENTING, MEMILIKI MINAT TERHADAP POLITIK, DAN SERING BERDISKUSI MENGENAI ISU-ISU POLITIK DENGAN TEMAN.**
- 2. PARTISIPASI AKTIF, SEJAUH MANA ORANG TERLIBAT DALAM ORGANISASI-ORGANISASI ATAU ASOSIASI-ASOSIASI SUKARELA**
- 3. PARTISIPASI YANG BERUPA KEGIATAN-KEGIATAN PROTES, SEPERTI IKUT MENANDATANGANI PETISI, MELAKUKAN BOIKOT, DAN DEMONSTRASI**

PARTISIPASI POLITIK/PUBLIC DALAM DEMOKRASI

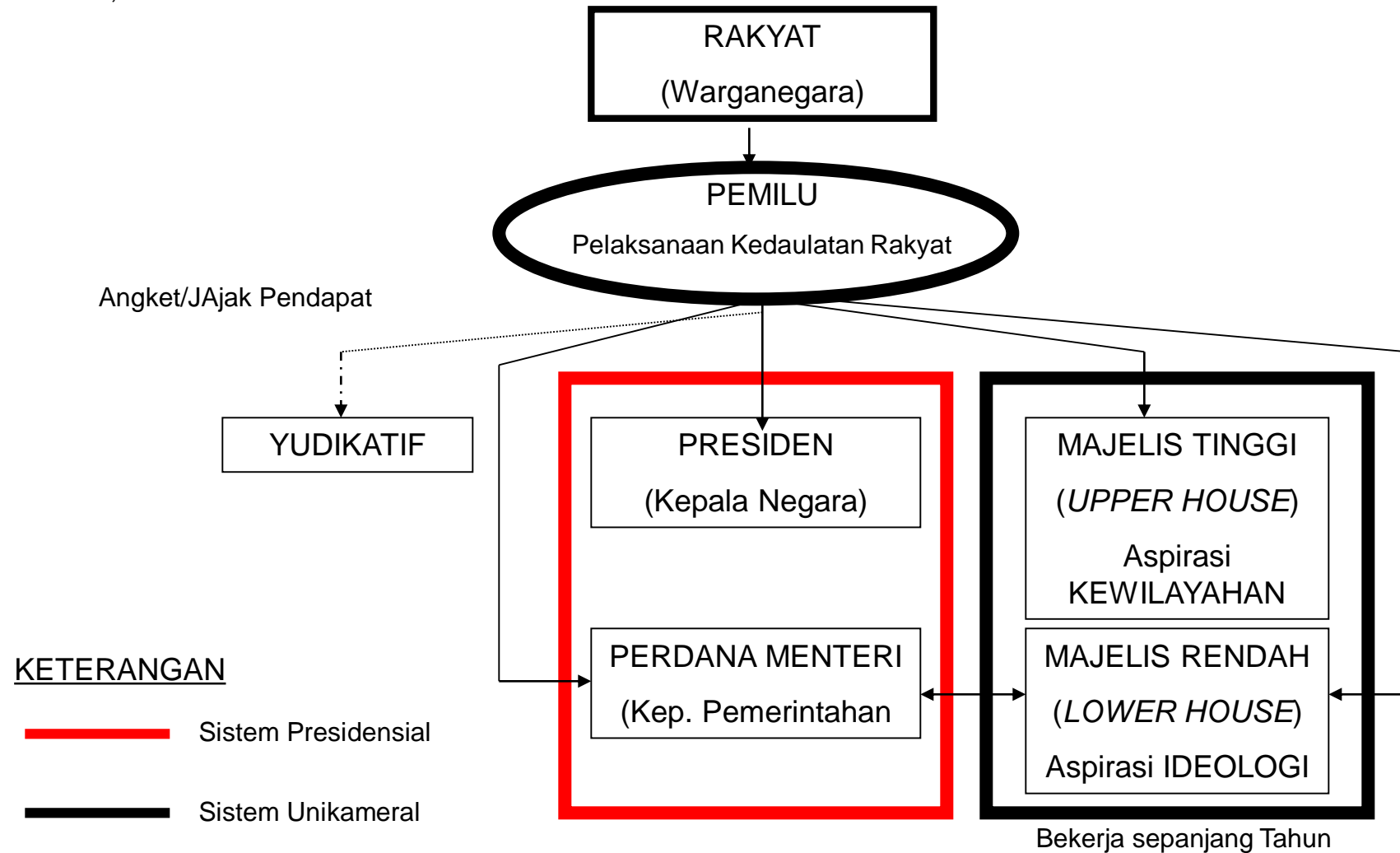
DEMOKRASI ADALAH BENTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERBAIK DARI YANG TERBURUK (*THE BEST AMONG THE WORST*). UNGKAPAN ITU MUNCUL PADA SAAT MEMBANDINGKANNYA DENGAN BENTUK-BENTUK PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN LAIN KARENA DI DALAM DEMOKRASI TERDAPAT PRINSIP-PRINSIP *LIBERTE*(KEBEBASAN), *EGALITE*(EGALITARIANISME), DAN *FRATERNITE*(KEBERSAMAAN)

Skema Dasar Sistem Pemerintahan Demokrasi

(Sistem Presidensial/ Parlementer Dan Unikameral/Bikameral)

Dikutup Dari Buku Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat

Oleh; Hendarmin Ranadireksa



PRINSIP KEBEBASAN MEMPUNYAI MAKNA BAHWA RAKYAT MEMPUNYAI KEBEBASAN BERKUMPUL, BERAGAMA DAN MENGELUARKAN PENDAPAT; PRINSIP EGALITARIANISME MAKNANYA ADALAH ADANYA PERASAMAAN DERAJAT DAN HAK DI DEPAN HUKUM; DAN PRINSIP FRATERNITE, PRINSIP INI MENJADI PENYEIMBANG PRINSIP KEBEBASAN YAKNI PENGHORMATAN TERHADAP HAK-HAK ASASI MANUSIA, DALAM HAL INI PALING TIDAK ADA 5 SYARAT DASAR PEMERINTAHAN DEMOKRASI:

- **PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL**
- **BADAN KEHAKIMAN YANG TIDAK MEMIHAK**
- **PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS**
- **KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT**
- **KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT/BERORGANISASI DAN BEROPOSISI**
- **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC EDUCATION)**
- **MIRIAM BUDIARDJO,1998, DASAR-DASAR ILMU POLITIK, JAKARTA: GRAMEDIA**

DEMOKRASI

PERPEKTIF Demokrasi pluralis (Robert Dahl)

- Demokrasi adalah kompetisi dan kontestasi kepentingan yang ada dalam masyarakat yang bersifat plural. Dengan kata lain, demokrasi dipandang sebagai sistem yang fleksibel dan responsif terhadap tuntutan masyarakat

Perspektif Demokrasi Elitis (Schumpeter)

- Demokrasi tak lebih dari kompetisi antar elit yang tak melibatkan massa yang luas.

Konsekuensi Pemakaian Perspektif

- Pengertian atau perspektif tentang demokrasi yang berbeda membawa konsekuensi yang berbeda pula terhadap makna partisipasi politik. Bagi penganut perspektif elit, partisipasi politik dianggap tidak penting dan tak bermakna.
- Namun partisipasi politik massa juga punya implikasi keamanan jika tidak diikuti kedewasaan semua pihak dalam mengawal kedaulatan rakyat.

Pandangan optimistis perspektif pluralis:

- Demokrasi adalah mekanisme kontrol masyarakat terhadap negara (*accountability*)
- Demokrasi sebagai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat (*representativeness*)
- Demokrasi sebagai mekanisme pencarian tanggungjawab pemerintah oleh masyarakat (*accountability*)
- Demokrasi sebagai pencarian legitimasi pemerintah dari masyarakat (*regime legitimacy*)
- Dus, mekanisme untuk melakukan semua itu adalah melalui kedewasaan politik dan partisipasi politik

JALAN Perubahan Menuju Demokrasi

JALAN perubahan menuju demokrasi pasca-Orde Baru telah dibajak oleh sekelompok elite (salah satunya polemik UU No 22 Tahun 2014 tentang pemilukada melalui DPRD). Pembajak itu adalah anggota elite lama Orde Baru dan elite baru yang datang setelah orde itu tumbang. Mereka tidak hanya bertahan, tapi menjadi kekuatan baru di bidang ekonomi dan politik yang memegang peran menentukan. Mereka melekat erat di parlemen, partai politik, di berbagai asosiasi sipil, politik, birokrasi baik ditingkat pusat sampai kedaerah, **yang terjadi DAULAT ELIT bukan DAULAT RAKYAT**

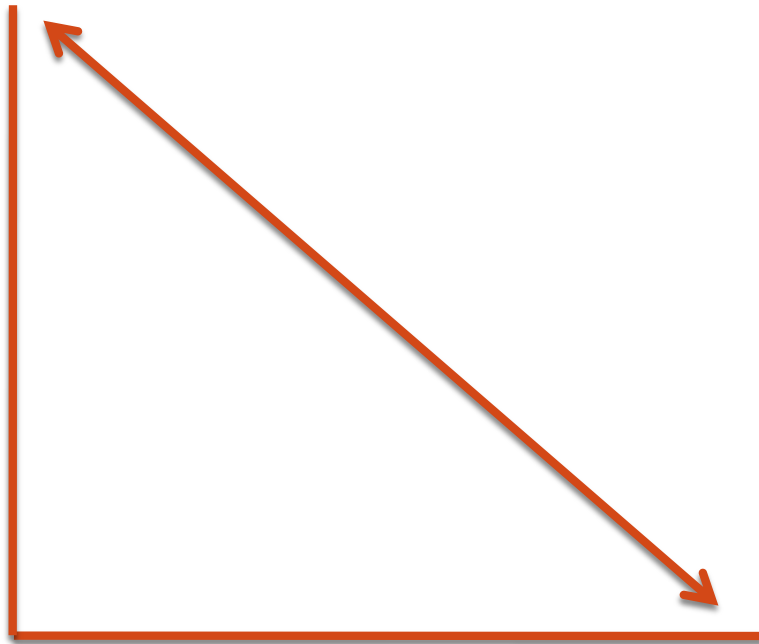
LOGIKA DEMOKRASI DI INDONESIA

Elite Politik

Rakyat

Pemodal

Elit berhimpitan
dengan pemodal
sehingga rakyat yang
seharusnya jadi ruh
demokrasi di
tinggalkan



PERTARUNGAN DEMOKRASI PLURALIS VS DEMOKRASI ELIT

Pembajakan demokrasi melalui UU 22 Tahun 2014 mendapatkan perlawanan dari masyarakat, perlawanan tersebut lahir karena Elit politik menjegal ruh demokrasi dengan menyumbat kedaulatan rakyat untuk memilih Pemimpin di daerah maka lahirlah Perpu No 1 Tahun 2014

TERIMAKASIH